

PENGARUH PARTAI GOLKAR TERHADAP DINAMIKA KEHIDUPAN POLITIK DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 1999-2009

Alfi Hafidh Ishaqro & Abraham Nurcahyo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partai golkar terhadap dinamika kehidupan politik di Kabupaten Madiun tahun 1999-2009. Lokasi Penelitian di DPD Golkar Kabupaten Madiun yang bertempat di jalan Raya Solo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

Penelitian ini berbentuk diskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan selama tiga bulan. Sumber data dari penelitian ini adalah dari informan, arsip dan dokumen. validasi yang digunakan untuk menguji kebenaran data dengan menggunakan triangulasi sumber penelitian. Sedangkan analisis data menggunakan analisis model interaktif yang menggunakan tiga teknik yakni reduksi data, sajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut: Partai Golkar pada tahun 1999-2011 mengalami perkembangan politik yang dinamis di Kabupaten Madiun. Partai Golkar hingga saat ini masih bertahan, tidak hanya diperhitungkan tetapi menjadi partai Politik yang disegani oleh kawan ataupun lawan. Partai Golkar yang semula menjadi sasaran hujatan dan intimidasi kini menjadi partai yang cukup dinamis dan disegani oleh banyak pihak. Dalam waktu sepuluh tahun Partai Golkar mampu membangun pengaruh di masyarakat Madiun, menjadi partai yang memiliki pengaruh dalam dinamika kehidupan Politik Kabupaten Madiun dari awal reformasi hingga tahun 2009.

Kata Kunci : Partai Golkar, Dinamika Politik, Kabupaten Madiun

**Alfi Hafidh Ishaqro adalah Alumni Pendidikan Sejarah IKIP PGRI MADIUN
Abraham Nurcahyo adalah Dosen Pendidikan Sejarah IKIP PGRI MADIUN*

Pendahuluan

A. Latar belakang masalah

Demokrasi secara etimologi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat atau penduduk dalam suatu tempat dan *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan (Inu Kencana Syafie.2009:114). Secara pengertian jelas bahwa dalam sebuah negara demokrasi kedaulatan mutlak ada di tangan rakyat yang tersalurkan dalam sebuah kegiatan yang bernama pemilu.

Pemilu sendiri adalah merupakan mekanisme demokrasi untuk pergantian pemerintahan dimana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya. Pemilu dalam sebuah negara demokratis harus dilaksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka di antara para pelaku pemilu yakni partai politik. Partai politik merupakan salah satu unsur penting demokrasi. Partai politik memiliki peran yang sangat strategis terhadap proses demokratisasi. Selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, tujuan partai politik adalah menciptakan lingkungan sosial dan kultural yang disitu setiap individu memiliki sarana material dan pendidikan untuk memaksimalkan potensi dirinya (Henry J Schmandt, 2009:6).

Fungsi lain partai politik yang sudah dijelaskan di atas adalah untuk mendidik sumber daya manusia yang cakap dalam berpolitik, sehingga melahirkan kader-kader berkualitas dalam memimpin dan mengelola sebuah kelembagaan politik yang bertujuan untuk mengemban dan melaksanakan amanah rakyat yang telah mempercayakan suara dan aspirasinya.

Partai politik dari era Orde lama, Orde baru hingga Reformasi mengalami gejolak dan pergulatan yang sangat dinamis. Dinamika ini terjadi karena sejak kemerdekaan diproklamasikan bangsa Indonesia mempraktekan tiga jenis demokrasi yakni demokrasi parlementer, terpimpin dan Pancasila (Peter Calvert, 2005:xiv).

Pembangkangan, pembubaran dan penggabungan atau yang terkenal dengan istilah fusi partai politik merupakan situasi yang pernah dirasakan semua partai politik dalam perjalanannya mewarnai proses kehidupan politik dan demokrasi bangsa Indonesia.

Dari sekian banyak partai politik yang pernah ada di Indonesia, penulis tertarik untuk mengamati dan meneliti salah satu partai politik yang ada yakni partai Golkar. Partai yang hingga kini masih bertahan dan tetap eksis dalam mewarnai dunia politik di Indonesia. Partai Golkar adalah partai yang cukup berpengaruh dan tak bisa dilepaskan dari dinamika pemerintahan di Indonesia dari masa ke masa. Dari sejarahnya partai Golkar merupakan realisasi dari upaya yang telah dirintis sejak era demokrasi terpimpin, ia lahir pada tanggal 20 Oktober 1964 dengan nama Sekertariat bersama atau yang lebih dikenal dengan istilah Sekber. Wadah baru ini menghimpun hampir 300 buah organisasi fungsional non politis yang berorientasi pada karya dan kekarya, yang dulunya tidak berorientasi kepada politik dengan tiga organisasi sebagai tulang punggungnya yaitu SOKSI, MKGR dan KOSGORO (www.wikipedia.com, diakses tanggal 2 Maret 2011)

Kehadiran Golkar dimasa orde baru dipandang sebagai implementasi dari niat dan keinginan para elite politik, yang pada awal pemerintahan orde baru ini digantikan oleh ABRI dan para teknokrat sebagai pengganti kaum sipil pada masa orde lama. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal dalam rangka pembaharuan politik di Indonesia. Struktur politik pun ditata ulang untuk membenahi institusi-institusi yang ada, baik yang ada dilembaga supra maupun infra struktur politik.

Melihat sejarah perjalanan partai politik di Indonesia, partai Golkar merupakan satu-satunya partai yang mampu bertahan dan tetap eksis dalam tiga periode pergulatan kehidupan politik di Indonesia. Periode tersebut yakni Orde lama, Orde Baru dan Reformasi. Bahkan partai Golkar semakin lama semakin dewasa dan matang dalam berpolitik, sehingga menjadikan partai ini sangat disegani oleh partai-partai politik yang menjadi kawan dan lawan dalam tatanan masyarakat, legislatif dan eksekutif.

Eksistensi dan perjalanan partai Golkar di Indonesia juga tak bisa dilepaskan dari peran struktur dan kader yang ada di daerah-daerah yang tersebar dalam berbagai wilayah di Indonesia. Peran para pengurus dan kader diberbagai daerah terutama di tingkat Kabupaten hingga desa begitu besar. Mereka berpengaruh cukup kuat karena mereka berfungsi sebagai alat sosialisasi partai politik di masyarakat tingkat bawah. Hal ini diperlukan karena sosialisasi politik adalah sebagai proses yang dimana tersampainya budaya suatu partai politik yaitu norma-norma dan nilai-nilai serta untuk menunjukkan hubungan antara cara-cara yang digunakan dan tujuan yang dikejar (J Schmandt, 2009:6).

Salah satu wilayah yang mempunyai sejarah cukup panjang dalam mewarnai kehidupan politik di Indonesia adalah Madiun. Seperti yang pernah diucapkan oleh Onghokam yang merupakan salah satu sejarawan terkemuka di Indonesia, beliau mengatakan bahwa, Madiun telah mempraktekan bahwa negara adalah pemilik semua tanah (Desak Made Oka Purnawati, 2004:20).

Dari berbagai fakta yang ada dalam catatan sejarah tentang Madiun tentunya menarik untuk menjelaskan kondisi perpolitikan yang ada di wilayah yang terdiri dari dua belas kecamatan ini dan keterkaitan dinamikanya dengan salah satu partai politik yang cukup berpengaruh saat ini yakni partai Golkar.

Salah satu aspek yang menarik perhatian penulis adalah perjalanan dan perolehan suara dalam keterwakilan di lembaga legislatif dan eksekutif. Pada masa pemilu yang diselenggarakan oleh orde baru partai Golkar bisa memperoleh lebih dari 60% suara pemilih di seluruh kecamatan di kabupaten Madiun. Tetapi setelah masa orde baru berakhir dan digantikan masa reformasi partai Golkar mengalami pasang surut dalam perolehan suara dalam pemilu tahun 1999 sampai pemilu 2009 atau yang ketiga kalinya selama masa reformasi (Wawancara dengan bapak Karyono, mantan anggota DPRD Partai Golkar).

Mengacu pada latar belakang tentang partai politik dan demokratisasi di Indonesia dari periode Orde lama hingga Reformasi. Dari era keterpurukan menuju tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis, serta dinamika perjalanan partai Golkar yang menarik untuk diteliti dan ditelaah khususnya diwilayah kabupaten Madiun pada tahun 1999-2009.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pengaruh partai Golkar terhadap dinamika kehidupan politik di Madiun tahun 1999-2009?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh partai Golkar terhadap dinamika kehidupan politik di Madiun tahun 1999-2009?

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah penulis selesaikan semoga bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Masyarakat
Sebagai referensi untuk pendidikan politik dan mengetahui situasi perpolitikan di Kabupaten Madiun pada tahun 1999-2009 yang tentunya berkaitan dengan partai Golkar.
2. Bagi DPD Partai Golkar
Sebagai koleksi pengarsipan kantor yang bisa dijadikan bahan diskusi para pengurus dan kader Partai Golkar di wilayah Kabupaten Madiun.
3. Bagi Pemerintah Kabupaten Madiun
Sebagai referensi untuk mengetahui seberapa besar peran Partai Golkar dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Madiun.
4. Bagi IKIP PGRI Madiun
Untuk menambah koleksi penelitian politik yang dirasa penulis sangat kurang peminat dikalangan mahasiswa IKIP PGRI Madiun.
5. Bagi penulis
Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh partai Golkar dalam dinamika kehidupan politik di Kabupaten Madiun tahun 1999-2009.

Kajian Pustaka

A. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama (Inu Kencana Syafi'i, 2009:158). Tujuan kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mereka.

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela, dimana seseorang turut aktif dalam kegiatan politik. Kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dan dipilih melalui pemilihan umum untuk menjadi anggota dalam lembaga politik negara seperti Senat, DPR, Presiden, Perdana Menteri dan pemimpin-pemimpin lokal sesuai dengan sistem masing-masing negara.

Perlu diketahui bahwa partai politik berbeda dengan gerakan (*movement*). Suatu gerakan, merupakan kelompok atau golongan yang selalu menuntut perubahan pada lembaga politik atau menciptakan tatanan dimasyarakat apabila lembaga politik dirasa gagal dalam

menjalankan tugasnya. Cara penyampaiannya pun bermacam-macam, antara lain melalui diskusi, seminar, rapat umum hingga cara yang lebih keras yakni demonstrasi atau aksi turun kejalan dengan mengerahkan sejumlah massa. Dibanding dengan partai politik, gerakan mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan bersifat fundamental, bahkan bersifat ideologis yang seringkali disebabkan karena ketidakseimbangan antar kelas tertentu (Henry J Schmandt,2009:63).

2. Fungsi Partai Politik

Partai politik sering dikatakan sebagai organisasi perjuangan, tempat seseorang atau kelompok mencari dan memperjuangkan kedudukan politik dalam negara (Cheppy Haricahyono,1991:190). Dalam suatu partai politik tentunya terdapat fungsi dalam kaitannya sebagai alat perjuangan untuk menguasai politik suatu negara. Dalam negara demokratis khususnya Indonesia partai politik memiliki beberapa fungsi, antara lain:

a. Partai Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan berbagai pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa sehingga berbagai masalah dalam masyarakat dapat terdengar dan mengupayakan untuk bisa diatasi. Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang dan tak berbekas apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang sama arahnya. Proses penggabungan aspirasi ini dinamakan "penggabungan kepentingan" (*interest aggregation*). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses perumusan ini dinamakan "perumusan kepentingan" (*interest articulation*) (Miriam Budiarto, 2009: 405).

Semua kegiatan di atas dilakukan oleh partai. Partai politik selanjutnya merumuskannya sebagai usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan ini dimasukkan dalam program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijaksanaan umum (*public policy*). Dengan demikian tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

Di lain pihak partai politik berfungsi juga untuk membicarakan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. dengan demikian terjadi arus informasi serta dialog dari atas ke bawah dan dari bawah keatas, dimana partai politik mempermainkan peranan sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dan masyarakat. Dalam menjelaskan fungsi ini partai politik sering disebut sebagai parantara dalam suatu bursa ide-ide(*clearing house of ideas*). Terkadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi masyarakat sebagai pengeras suara.

b. Partai Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Partai politik juga memainkan peranan sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*). Dalam ilmu

politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui dimana memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak hingga dewasa. Di samping itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui dimana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam hubungan ini partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik. Dalam usaha menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Untuk itu partai berusaha menciptakan "*image*" bahwa dia memperjuangkan kepentingan masyarakat umum. Disamping menanamkan solidaritas dengan partai, partai politik juga mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional. Di negara-negara baru partai-partai politik juga berperan untuk memupuk identitas nasional dan integritas nasional.

Proses sosialisasi politik juga diselenggarakan melalui berbagai diskusi penerangan, kaderisasi, penataran dan berbagai macam bentuk kegiatan dan pelatihan lainnya.

c. Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik.

Partai politik juga dapat berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang memiliki kompetensi dan bakat kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitmen*). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Dengan cara melalui hubungan pribadi, persuasi dan berbagai pendekatan yang lainnya. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang berpengaruh dimasa mendatang supaya terjadi regenerasi kepemimpinan, selain itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan (Miriam Budiarjo, 2009: 408).

d. Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Dalam suasana atau kondisi demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Apabila terjadi konflik partai politik berusaha mengatasinya atau menjadi penengah dalam berbagai perbedaan pendapat. Dalam praktek politik sering dilihat bahwa fungsi-fungsi tersebut tidak dilaksanakan seperti yang diharapkan. Misalnya informasi yang diberikan justru menimbulkan berbagai tafsir, kegelisahan dan perpecahan dalam masyarakat atau dengan kata lain yang dikejar bukan kepentingan nasional, akan tetapi kepentingan partai yang berorientasi sempit dengan menimbulkan akibat pengkotakan politik, atau konflik tidak diselesaikan, akan tetapi malah dipertajam, maka dari itu partai politik berfungsi untuk mengatur sebaik mungkin pertentangan yang ada. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik (Miriam Budiarjo, 2009: 409).

B. Dinamika Politik

Dinamika dalam perspektif ilmu sosial berarti sebuah pergerakan atau sesuatu yang terus berjalan dan bergerak dimasyarakat (Kamus besar bahasa Indonesia). Sedangkan politik adalah pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara (www.wikipedia.com, diakses selasa 3 April 2011). Sedangkan dalam teori klasik menurut Aristoteles, politik adalah seperangkat hipotesa mengenai proses atau institusi pemerintahan (Henry J Schmandt, 2009:4). Dari rangkaian pengertian tersebut berarti dinamika politik adalah pergerakan dalam masyarakat yang berkaitan dengan kekuasaan yang berwujud pada pembuatan kebijakan dan pengaruhnya terhadap kepentingan masyarakat. Dalam dinamika politik yang terjadi dalam kehidupan politik suatu negara tentunya terdapat sejumlah instrumen yang berperan dalam mewarnai pergolakan yang terjadi. Salah satu instrumen yang paling banyak mengambil peran dalam dinamika yang sering kali terjadi adalah partai politik, karena dalam sebuah negara demokrasi partai politik adalah unsur yang paling penting dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi unsur lain yang tak kalah pentingnya adalah masyarakat, walaupun masyarakat sendiri masih memiliki minat dan kapasitas yang rendah dalam mengambil peran pada sebuah penyelenggaraan negara karena masih terhegemoni atau masih dalam bayang-bayang kekuatan politik yang terjadi didalam masyarakat (Arbi Sanit, 1993:5).

Di Indonesia, semenjak negara ini merdeka sampai saat ini mengalami berbagai dinamika politik yang menarik dan sangat dinamis. Mulai dari Orde Lama, Orde Baru sampai reformasi bangsa ini terus mengalami pergolakan yang dinamis yang tentunya tak lepas dari peran partai politik, karena partai politik dari era Orde Lama hingga sekarang begitu berperan dan mendominasi perjalanan pasang surutnya bangsa Indonesia.

1. Dinamika Politik Orde Lama

Kemerdekaan adalah modal bagi bangsa Indonesia dalam mencari identitas, sesuai yang dicita-citakan. Bagi bangsa Indonesia pengalaman semasa penjajahan. Bagi bangsa Indonesia pengalaman semasa penjajahan telah mengajarkan betapa parahnya kehancuran sistem sosial dan politik akibat eksploitasi manusia dan alam yang dilakukan oleh penjajah, dalam hal ini Belanda. Tiga setengah abad lebih bangsa Indonesia terkurung dalam kondisi yang memprihatinkan.

Usai mengalami perjuangan yang amat panjang akhirnya kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, dalam politik Indonesia merdeka secara *de facto*. Tetapi perjuangan tak cukup sampai disini karena disaat bangsa Indonesia mulai menata sistem dan kelengkapan negara, Belanda tidak begitu saja melepas Indonesia dan ingin menguasai kembali negara yang kaya akan berbagai macam sumber daya alam dan beraneka ragam budaya ini. Di saat inilah terjadi sebuah pergolakan dan perjuangan yang kompleks bagi seluruh komponen bangsa Indonesia, dikatakan cukup kompleks karena di era tahun 1945-1949 bangsa Indonesia mengalami cobaan yang cukup berat, khususnya pada tahun 1948 dimana Indonesia menghadapi dua musuh sekaligus yakni Belanda dan PKI. Pemberontakan PKI atau dikenal dengan Madiun affair berawal dari kegagalan kabinet yang dipimpin Mr. Amir Syarifuddin mengawal upaya diplomatis dalam

menghadapi Belanda yakni ditandatanganinya perjanjian Renville yang sangat merugikan bangsa Indonesia (A.M. Suryanegara, 240:2010)

Usai mendapat pengakuan dari dunia Internasional pada tahun 1949 dengan disepakatinya KMB di Deen Haag, Indonesia benar-benar menjadi negara yang berdaulat dengan bentuk RIS yang kemudian dikembalikan lagi menjadi NKRI. Dimasa periode inilah Indonesia menerapkan sistem Demokrasi Liberal sampai tahun 1959. Dalam masa Demokrasi Liberal Indonesia berhasil menyelenggarakan Pemilu secara demokratis untuk pertama kalinya yang dimenangkan oleh Masyumi, PNI, NU dan PKI. Dari hasil Pemilu inilah Presiden Soekarno mencetuskan faham NASAKOM yakni Nasionalis yang mewakili golongan PNI, Agama yang mewakili Golongan Masyumi dan NU, serta Komunis yang mewakili golongan PKI.

Seiring berjalannya waktu ternyata pemilu terbukti tak mampu meredam pergolakan politik yang terus mengganggu stabilitas negara, bahkan salah satu partai pemenang pemilu yakni Masyumi diindikasikan terlibat pemberontakan PRRI di Sumatra Utara dan berujung pada pembubaran partai tersebut oleh presiden Soekarno. Dari berbagai problematika inilah menyebabkan goyahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga Negara.

Dengan semakin memburuknya kondisi negara saat itu maka sistem Demokrasi liberal pun segera diakhiri oleh Presiden Soekarno dengan dikeluarkannya dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 dan untuk memperbaiki keadaan yang saat itu dianggap buruk maka Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin untuk melandasi usaha penataan kembali peta dan kehidupan politik di Indonesia yang saat itu mengalami ketidakjelasan orientasi. Hal ini sangat terlihat karena adanya keceberdungan tidak adanya keseimbangan antara partisipasi politik dan perkembangan ekonomi (Arbi Sanit, 1993:5).

Di era demokrasi terpimpin Presiden Soekarno membuat beberapa kebijakan yang cukup berpengaruh terhadap eksistensi bangsa Indonesia di dunia Internasional, Kebijakan yang pernah membuat bangsa Indonesia disegani dan juga terkucilkan dikancah politik dunia. Selain itu situasi politik dalam negeri pun mengalami instabilitas karena tidak adanya keseimbangan antara Presiden dan Partai politik. Partai politik pada saat Demokrasi terpimpin tidak dapat mewarnai dinamika politik dalam negeri, hal ini disebabkan karena pamor partai tertutupi oleh kebesaran Presiden Soekarno yang hampir disemua lini menunjukkan hegemoninya sebagai Pemimpin Besar Revolusi.

Dan pada Akhirnya Pada tahun 1965 terjadi sebuah peristiwa bersejarah, sejarah kelam bangsa Indonesia yakni Gestapu atau Gerakan tiga puluh September yakni penculikan dan pembunuhan para Jendral dan pucuk pimpinan Angkatan Darat. Ditinjau dari sudut politik usai peristiwa tersebut adalah munculnya suasana baru dalam peta politik dalam negeri. Tidak saja tersingkirnya dua kekuatan politik yang saat itu begitu kuat yakni Soekarno dan PKI, tetapi lebih dari itu adalah perubahan struktur politik dalam hal ini adalah kelembagaan negara serta sebagai awal tumbanganya era Orde Lama. Peristiwa tersebut juga menandai transisi

kekuatan politik dari penguasaan sipil ke militer yang dikawal oleh Angkatan Darat yang pada saat itu dipimpin oleh Letjen Soeharto.

2. Dinamika Politik Orde Baru

Poros kekuatan Orde Baru terbentuk melalui pembentukan Golongan Karya yang mendapat dukungan dari pemerintah dan ABRI. Golongan Karya adalah realisasi upaya yang telah dirintis oleh golongan Angkatan Darat masa demokrasi terpimpin. Golkar lahir pada tanggal 20 Oktober 1964 dengan nama awal yakni sekertariat bersama (SEKBER) Golkar. Wadah baru ini menghimpun hampir 300 non organisasi fungsional politis yang berorientasi kepada kekaryaan. Organisasi yang menjadi tulang punggung SEKBER adalah SOKSI, KOSGORO dan MKGR.

Selain daripada itu naiknya Soeharto yang menjadi tokoh sentral Orde Baru ke pentas Nasional tak dapat dilepaskan dari peran para mahasiswa yang saat itu melakukan demonstrasi besar-besaran dengan berbagai tuntutan yang terkenal dengan Tritura yakni Tri tuntutan rakyat. Tritura berisi turunkan harga, bubarkan kabinet dan bubarkan PK. Hingga pada akhirnya Soeharto naik menjadi Presiden setelah laporan pertanggungjawaban presiden Soekarno yang terkenal dengan pidato Nawaaksara ditolak oleh MPRS yang dipimpin oleh Jendral A.H. Nasution yang pada akhirnya mendorong MPRS mengambil langkah-langkah konstitusional (Mensesneg, 1994:152)

Usai dilantik menjadi Presiden, Soeharto segera membuat sejumlah kebijakan untuk memperbaiki keadaan negara, salah satunya adalah menyelenggarakan Pemilu pada tahun 1971 yang pada saat itu diikuti oleh sembilan partai politik dan satu Golongan Karya. Pemilu pertama pada era Orde Baru tersebut dimenangkan oleh Golkar secara mutlak.

Kemenangan Golkar saat itu cukup mengagetkan banyak kalangan mengingat Golkar pada saat itu merupakan kekuatan politik yang bisa terbilang baru dan tidak mempunyai basis massa yang kuat dikalangan arus bawah. Namun para analis politik saat itu mengakui bahwa strategi yang diterapkan Golkar dalam merebut simpati rakyat cukup berhasil. Dengan motto "politik no, pembangunan yes" sambil terus mngungkit-ungkit kegagalan partai politik di era Orde Lama cukup mengena dihati rakyat yang pada saat itu memang mengalami suatu kejenuhan kepada partai politik. Partai politik mengalami degradasi kepercayaan dari rakyat Indonesia karena pada era Orde Lama partai politik sering mengalami konflik yang menimbulkan berbagai krisis yang tentunya berimbas kepada kesejahteraan rakyat.

Kemenangan mutlak yang diperoleh Golkar membuat pemerintahan Orde Baru semakin kuat. Pada perkembangan selanjutnya Presiden Soeharto membuat kebijakan politik yang menimbulkan kontroversi dan cukup menyakitkan sejumlah pihak dan golongan. Kebijakan tersebut adalah penciptaan peserta pemilu dimana partai politik dipaksa untuk melakukan fusi atau penggabungan parpol sehingga pada akhirnya pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1977-1997 hanya diikuti oleh tiga kontestan yakni Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan dan Golongan Karya (AM. Suryanegara, 2010: 490). Dari lima kali penyelenggaraan pemilu hingga tahun 1997 atau

mendekati jatuhnya Presiden Soeharto, selalu dimenangkan oleh Golkar dengan berbagai indikasi kecurangan yang cukup sistematis.

Metodologi Penelitian

A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian mengenai Pengaruh Partai Golkar Terhadap Dinamika Kehidupan Politik Di Kabupaten Madiun tahun 1999-2009 merupakan penelitian politik yang dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Wilayah Kabupaten Madiun. Mengingat yang dipelajari adalah salah satu partai politik yang memiliki basis massa yang sangat besar dan merupakan salah satu partai yang memiliki pengaruh terhadap dinamika politik di Kabupaten Madiun.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan selama kurang lebih 4 bulan yaitu bulan April sampai dengan bulan Juli 2011.

B. Sumber Data

Sumber data suatu penelitian kualitatif dapat berupa manusia dengan tingkah lakunya, peristiwa, dokumen, dan benda-benda lain. Untuk meneliti Pengaruh Partai Golkar terhadap dinamika kehidupan politik di Kabupaten Madiun, maka sumber data yang dapat dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung (melalui wawancara atau observasi) dengan narasumber atau objek yang diteliti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai informasi yang telah dikumpulkan atau dipublikasikan oleh pihak lain, termasuk lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Data sekunder ini diperlakukan sebagai data perlengkapan atau data penunjang. Adapun jenisnya dapat berupa foto, dokumentasi atau arsip, selebaran, laporan atau buku-buku yang relevan.

C. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap bentuk penelitian. Oleh karena itu berbagai hal yang merupakan bagian dari keseluruhan proses pengumpulan data harus benar-benar dipahami oleh setiap peneliti. Kurang mantapnya pemahaman peneliti mengenai landasan keyakinan teori yang mewarnai proses pengumpulan data penelitian kualitatif akan sering menyesatkan arah penelitian dan mengaburkan karakteristik yang terbentuk paradigma penelitiannya (Sutopo, 2006:54)

Untuk mengumpulkan data penelitian ini, maka metode yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila Sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat

secara sistematis serta dapat dikontrol keandalannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya).

Observasi merupakan salah satu teknik yang paling banyak dilakukan dalam penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif, baik sosial maupun humaniora. Dalam etnografi teknik observasi dikategorikan sebagai aliran utama.

Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Namun manusia mempunyai sifat pelupa. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan, alat elektronik, lebih banyak melibatkan pengamat, memusatkan data yang relevan serta menambah bahan persepsi tentang objek yang diamati.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan bersifat mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal terstruktur, guna menggali pandangan subyek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh dan mendalam. Oleh karena itu kesimpulan yang diperoleh lebih reliabel (Husaini Usman, 2004:59)

Dalam penelitian ini informan yang diperlukan adalah kalangan yang berkepentingan dengan penelitian ini. Seperti masyarakat umum, anggota DPRD, Anggota KPU, Akademisi dan pengurus partai Golkar.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi, 2008:158)

Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti (Sutopo, 2006:80)

Sumber dokumen dalam penelitian ini berasal dari berbagai arsip seperti buku dan media massa yang berbentuk koran, majalah dan tabloid. Media massa bisa menjadi rujukan data karena banyak menginformasikan berita tentang kegiatan politik. Karena sumber media dapat memberikan pemahaman tentang konteks dari perilaku politik (Lisa Horisson, 2007:126). Sumber dokumen lain yang bisa digunakan selain media massa adalah sumber partai. Sumber partai adalah segala sesuatu atau keterangan yang berasal dari partai politik mengenai aktifitas atau dokumentasi yang berkaitan dengan partai politik, seperti Surat Keputusan, dokumen kepengurusan dan lain sebagainya.

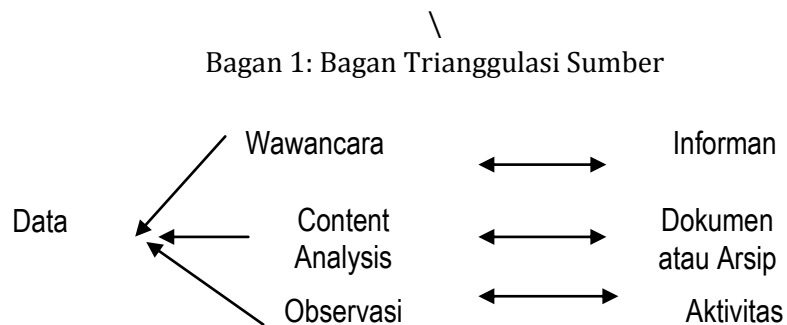
D. Validitas Data

Data yang telah berhasil digali di lapangan, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian untuk kemantapan dan kebenarannya. Validitas data merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsir makna sebagai hasil penelitian (Sutopo, 2006:91).

Penelitian kualitatif memiliki beberapa cara yang bisa dipilih dalam mengembangkan validitas data penelitian, salah satunya adalah triangulasi data. Pada dasarnya, triangulasi merupakan teknik yang didasari pada pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif, artinya untuk menarik sebuah kesimpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya satu sudut pandang, namun membutuhkan beberapa sudut pandang (Sutopo, 2006:92).

Validasi digunakan untuk menguji kebenaran data dengan menggunakan triangulasi sumber penelitian. Hal ini mengarahkan agar di dalam pengumpulan data lebih menggunakan beragam sumber data yang berbeda. Artinya, sebuah data akan lebih terukur kebenarannya apabila dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda.

Bagan Triangulasi sumber dapat dilihat dibawah ini:



Sumber : Herybertus Sutopo, 2006:94

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang telah diperoleh melalui penganalisaan terhadap data yang telah terkumpul, oleh karena itu metode analisis data harus dipersiapkan terlebih dahulu di dalam suatu rangkaian, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif dengan tiga komponen utama yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari semua jenis informasi yang tertulis lengkap dalam catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian (Sutopo 2006:114)

2. Sajian data

Sebagai analisis komponen kedua, sajian data merupakan rakitan informasi, deskripsi dalam bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data ini disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat dalam reduksi data, dan sajian dengan menggunakan kalimat dan bahasa peneliti yang merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila di baca, akan bisa mudah dipahami (H.B Sutopo, 2006:114-115)

3. . Penarikan simpulan dan verifikasi

Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bis dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilanjutkan verifikasi yang merupakan aktivitas pengulangan untuk tujuan pematapan, penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis sajian data dengan melihat kembali pada catatan lapangan (H.B Sutopo, 2006:116)

Reduksi sajian data ini harus disusun pada waktu peneliti sudah mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Bila simpulan dianggap kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti wajib kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung simpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data.

Hasil Penelitian

A. Berdirinya Partai Golkar di Kabupaten Madiun

Pada dasarnya peranan partai politik di Indonesia khususnya di Wilayah Kabupaten Madiun yang termasuk dalam daerah pemilihan VIII pada pemilu 1999-2009 bersama-sama membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan beradab sebagaimana termaktub didalam pembukaan UUD 1945.

Perwujudan cita-cita bersama tersebut menuntut keterlibatan semua pihak yang menjadi unsur kekuatan bangsa, baik secara Individual maupun kolektif, sekaligus merupakan hak dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Partai Golkar sebagai wadah dan alat perjuangan serta kekuatan politik rakyat berazaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 sesuai jiwa dan semangat lahirnya pada 1 juni 1945. Didalam perwujudannya, Partai Golkar mempunyai jati diri kebangsaan,kerakyatan dan keadilan sosial dengan watak demokratis, merdeka, pantang menyerah dan terbuka yang seluruhnya merupakan modal perjuangan untuk membangun bangsa dan karakter serta menggerakkan kekuatan dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan negara.

Secara kesejarahan Partai Golkar berawal dari rongrongan PKI atau kekuatan kiri. Pada tahun 1964 untuk menghadapi kekuatan PKI, golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat (seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional maka atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya, disingkat Sekber Golkar, pada tanggal 20 Oktober 1964. Terpilih sebagai Ketua Pertama, Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprpto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

Pada awal pertumbuhannya, Sekber Golkar beranggotakan 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. Ini terjadi karena adanya kesamaan visi diantara masing-masing anggota. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaan ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Organisasi Profesi, Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM), Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI), Gerakan Pembangunan

B. Partai Golkar dan Dinamika Politiknya di Kabupaten Madiun

Untuk menghadapi Pemilu 1971, 7 KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya. Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

Pada Pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik Golkar kepada grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang. Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke Golkar.

Hasilnya di luar dugaan. Golkar sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh propinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR.

Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekretariat Golkar mengubah dirinya menjadi Golkar. Golkar menyatakan diri

bukan parpol karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya.

September 1973, Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi Golkar pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI)

Setelah Peristiwa G30S maka Sekertariat bersama Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno.

Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar.

Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur tersebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. Di Madiun pun ketiga jalur tersebut sangat efektif sehingga Partai Golkar selalu mengalami kemenangan-kemenangan gemilang sebelum runtuhnya Kekuatan Orde Baru yang mengubah peta politik di Kabupaten Madiun.

Berikut susunan kepengurusan Partai Golkar pada Tahun 1999 sampai tahun 2009:

Tabel 1.2

Struktur Komposisi Kepengurusan BPH Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Madiun Tahun 1999-2004.

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Tomo Budi Harsoyo	Ketua
2	Soedjadi	Wakil Ketua
3	Drs. Moehadji	Wakil ketua
4	Suharto	Wakil ketua
5	H. Soeprapto	Wakil ketua
6	Masrurotin	Wakil ketua
7	Dimiyati	Wakil ketua
8	Drs. H. Suhadjak. MM	Sekretaris
9	Sukemi	Wakil Sekretaris
10	Hartutik	Wakil sekretaris
11	Ir. Irwan Taufan Fattah	Bendahara
12	Ir. Indah Rekyani	Wakil bendahara

SK DPD Partai Golkar No: KEP.049/DPD-1/PG/V/1999

Tabel 1.3

Struktur Komposisi Kepengurusan BPH Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Madiun Tahun 2004-2009.

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Tomo Budiharsojo	Ketua

2	H. Soeprapto	Wakil ketua
3	Drs. H. Sujadi AK, M.M	Wakil ketua
4	Heri Mulyono	Wakil ketua
5	Caterhine Soemadiono	Wakil ketua
6	Gumono	Wakil ketua
7	Suharno	Wakil ketua
8	Mashudi	Wakil Sekertaris
9	Suwarno, S.Pd, M.Pd	Wakil Sekertaris
10	Sukemi	Wakil Sekertaris
11	Sayful Arif, SH	Wakil Sekertaris
12	Ir. Irwan Taufan Fattah	Bendahara
13	Drs. Mujono, M.Si	Wakil Bendahara
14	Siti Khomisah	Wakil Bendahara

*Sumber: SK DPD Partai Golkar
No: Musda-013/DPD-1/PG/X/2004*

C. Sayap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Partai Golkar

Tak banyak Partai yang memiliki Ormas atau sayap partai untuk menjalankan roda Organisasi. Partai Golkar merupakan salah satu partai yang memiliki Ormas dalam membantu menjaga eksistensi partai, di Kabupaten Madiun setidaknya Partai Golkar memiliki tiga ormas yang berfungsi untuk mengembangkan kaderisasi dan pemenangan partai dalam pemilu (wawancara dengan Bapak Suharno, Sekertaris DPD Partai Golkar Kab. Madiun). Berikut ini adalah nama-nama ormas beserta struktur kepengurusannya.

1. AMPI (Angkatan Muda Pemuda Indonesia)

Tabel 1.4

Struktur kepengurusan BPH DPD AMPI Kabupaten Madiun tahun 2006-2011.

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Mujono, M.Si	Ketua
2	H. Atmaja Santo	Wakil ketua
3	Ir. Agus Pujo Prasetyo	Wakil ketua
4	Ambang Prasetyo Utomo, S.STP	Sekertaris
5	Mashudi S.Ag	Wakil Sekertaris
7	Rahmad Himawan, SE	Bendahara
8	Dedik Tri Herlambang	Bendahara I
9	Dina Puspa Dewi	Bendahara II
6	Tri Arfian Efendi	Wakil Sekertaris

Sumber: SK DPD AMPI Tahun 2006-2011

2. KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar)

Tabel 1.5

Struktur Kepengurusan BPH DPD KPPG Kabupaten Madiun tahun 2002-2011

NO	NAMA	JABATAN
1	Yayuk Tomo Budiharsojo	Ketua

2	Sri Wahyuning Urip Soeprapto	Ketua Harian
3	Masada Soehadji	Wakil Ketua
4	Sujati	Wakil Ketua
5	Lulies Sudjasmo	Wakil Ketua
6	Indah kencono	Sekretaris
7	Hartutik	Wakil Sekretaris
8	Peny Kusumahati, SE	Wakil Sekretaris
9	Ir. Prita Savitri	Bendahara
10	Djuharin Suharto	Wakil Bendahara

Sumber: SK DPD KPPG Kab. Madiun

D. Perolehan Partai Golkar pada pemilu 1999-2009.

Runtuhnya kekuatan Orde Baru pada tahun 1998 sangat mempengaruhi eksistensi Partai Golkar, mengingat Partai Golkar adalah kendaraan politik era Orde Baru dalam menjaga kekuasaan rezim yang dimana pada setiap pemilu mulai awal Orde Baru hingga tahun 1997 mengalami kemenangan-kemenangan gemilang. Usai jatuhnya Soeharto karena adanya gelombang unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan mahasiswa membuat peta politik di Indonesia berubah dan mengalami dinamika.

Dalam hal ini juga berpengaruh terhadap eksistensi partai Golkar ditingkat daerah khususnya Kabupaten Madiun. Pada pemilu pertama sejak reformasi digulirkan yakni tahun 1999-2009 partai Golkar mengalami perolehan suara yang sangat dinamis. Dimana dari satu pemilu ke pemilu selanjutnya mengalami pasang surut. Berikut hasil perolehan suara partai Golkar dari pemilu tahun 1999 hingga pemilu ketiga di era reformasi yakni pada tahun 2009

Tabel 1.6. Perolehan suara Partai Golkar pada Tahun 1999

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Nglames	2975
2.	Jiwan	5664
3.	Sawahan	2343
4.	Balerejo	3076
5.	Wonoasri	1476
6.	Mejayan	3351
7.	Pilangkenceng	2820
8.	Saradan	7933
9.	Gemarang	5074
10.	Kare	4747
11.	Wungu	4702
12.	Geger	4105
13.	Dagangan	3361
14.	Kebonsari	3018

15.	Dolopo	2807
Jumlah		57453

Sumber: Arsip DPD Partai Golkar Kab. Madiun.

Dengan total 57453 suara Perolehan kursi partai Golkar di DPRD Kab. Madiun adalah 6 kursi. Berikut adalah nama-nama calon legislatif yang terpilih:

Tabel 1.6
Anggota DPRD terpilih hasil pemilu 1999

NO	NAMA	POSISI
1	Drs. Soehadji	Wakil Ketua
2	Soesanto	Komisi A
3	Drs. H. Dimiyati	Komisi C
4	Setiono	Komisi B
5	H. Soeprapto	Komisi A
6	Patemin	Komisi D

Sumber: Arsip DPD Partai Golkar Kab. Madiun

Tabel 1.7
Perolehan suara partai Golkar pada pemilu Tahun 2004

NO	Kecamatan	Jumlah
1.	Nglames	3015
2.	Jiwan	6228
3.	Sawahan	3155
4.	Balerejo	4315
5.	Wonoasri	2108
6.	Mejayan	3677
1.	Pilangkenceng	3981
2.	Saradan	8110
3.	Gemarang	5201
4.	Kare	4899
5.	Wungu	5911
6.	Geger	4434
7.	Dagangan	3988
8.	Kebonsari	3790
9.	Dolopo	3819
Jumlah		68091

Sumber: Arsip DPD Partai Golkar Kab. Madiun.

Dengan total 68091 suara Perolehan kursi partai Golkar di DPRD Kab. Madiun adalah 12 kursi. Berikut adalah nama-nama calon legislatif yang terpilih:

Tabel 1.8
Anggota DPRD terpilih hasil pemilu 2004

NO	NAMA	Posisi
1	Tomo Budiharsojo	Ketua DPRD
2	Suparno	Komisi A
3	Suharno, SH	Komisi A
4	Sumadi	Komisi A
5	Drs. Mujono, MSi	Komisi B

6	Gunawan	Komisi B
7	Puryanto	Komisi B
8	Drs. Sujadi Abdul Qadir	Komisi C
9	Setiono	Komisi C
10	Karyono	Komisi D
11	Hery Mulyono	Komisi D
12	H. Soeprpto	Komisi D

Sumber: Arsip DPD Partai Golkar Kab. Madiun

Tabel 1.9.

Perolehan suara partai Golkar pada pemilu Tahun 2009

NO	Kecamatan	Jumlah
1.	Nglames	3192
2.	Jiwan	6122
3.	Sawahan	2196
4.	Balerejo	5295
5.	Wonoasri	3189
6.	Mejayan	6061
7.	Pilangkenceng	6341
8.	Saradan	5704
9.	Gemarang	4785
10.	Kare	4197
11.	Wungu	3537
12.	Geger	3526
13.	Dagangan	4567
14.	Kebonsari	3601
15.	Dolopo	2001
Jumlah		64313

Sumber: Arsip DPD Partai Golkar Kab. Madiun.

Dengan total 64313 suara Perolehan kursi partai Golkar di DPRD Kab. Madiun adalah 8 kursi. Berikut adalah nama-nama calon legislatif yang terpilih:

Tabel 1.10

Anggota DPRD terpilih hasil pemilu 2009

NO	NAMA	Posisi
1	Drs. Mujono	Wakil Ketua DPRD
2	H. Bagus Risky Dinarwan, SSI, MT	Komisi A
3	Mahudi, S.Ag	Komisi D
4	Ir. Prita Savitri	Komisi D
5	Drs. Suparno	Komisi A
6	Gunawan	Komisi B
7	Setiono	Komisi C
8	Suwadi	Komisi B

Sumber: Arsip DPD Partai Golkar Kab. Madiun

E. Sistem Kepartaian

Dalam sebuah negara demokrasi tentunya partai politik adalah bagian dari dinamika perjalanan suatu negara, dimana partai politik memiliki sebuah peran yang besar dalam menentukan masa depan suatu bangsa. Untuk mengakomodir dan menyalurkan aspirasi rakyat partai politik memerlukan sebuah sistem dan alat untuk berdemokrasi, salah satu rutinitas yang selalu dilalui partai politik adalah pemilihan umum atau yang lebih akrab dikenal dengan pemilu. Tapi diberbagai negara didunia terdapat beberapa sistem yang hanya terdapat satu partai politik untuk memayungi kekuasaan rezim tertentu. Berikut adalah beberapa sistem kepartaian yang dianut oleh berbagai negara didunia.

1. Sistem Partai Tunggal

Ada sebagian pengamat yang berpendapat bahwa istilah sistem partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri. Sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian. Namun demikian, istilah ini telah tersebar luas dikalangan masyarakat dan dipakai baik untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara maupun untuk partai yang mempubyai kedudukan dominan diantara beberapa partai lain. Dalam kategori terakhir terdapat banyak variasi.

Pola partai tunggal terdapat di beberapa negara, yakni afrika, China, dan kuba. Sedangkan negara Eropa Timur termasuk dalam kategori ini. Suasana kepartaian dinamakan non kompetitif karena semua partai harus menerima pimpinan dari partai yang dominan, dan tidak diperbolehkan bersaing dengannya.

Terutama di Negara-negara yang baru lepas dari kolonialisme ada kecenderungan kuat untuk memakai pola sistem partai tunggal karena pimpinan dihadapkan dengan masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai golongan, daerah, serta suku bangsa yang berbeda corak sosial serta pandangan hidupnya. Dikhawatirkan bahwa bila keanekaragaman sosial dan budaya ini tiak diatur dengan baik akan terjadi gejolak-gejolak sosial politik yang akan menghambat pembangunan. Padahal pembangunan itu harus memfokuskan diri pada suatu program ekonomi yang berkelanjutan.

Negara yang paling berhasil dalam menerapkan sistem partai tunggal adalah Uni Soviet yang pada masa jayanya berhasil meyakinkan dan memaksa masyarakat untuk menerima persepsi pimpinan partai mengenai kebutuhan utama dari masyarakat seluruhnya. Partai komunis Uni Soviet bekerja dalam suasana yang tidak kompetitif karena tidak ada partai lain yang diperbolehkan bersaing, atau dengan kata lain oposisi dianggap sebagai pengkhianatan. Partai tunggal serta organisasi yang bernaung di bawahnya berfungsi sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat serta menekankan perpaduan dari kepentingan partai dengan kepentingan rakyat secara menyeluruh.

Di Indonesia pada tahun 1945 ada usaha mendirikan partai tunggal sesuai dengan pemikiran pada saat itu banyak dianut di negara-negara yang baru melepaskan diri dari penjajahan. Diharapkan partai itu akan menjadi motor perjuangan. Akan tetapi sesudah beberapa bulan usaha itu dihentikan sebelum terbentuk secara konkret. Penolakan ini antara lain disebabkan karena dianggap berbau fasis.

2. Sistem Dwi Partai

Dalam sistem ini partai-partai dengan jelas dibagi dalam partai yang berkuasa (karena menang dalam pemilihan umum) dan partai oposisi (karena kalah dalam pemilihan umum). Dengan demikian jelaslah letak tanggung jawab mengenai pelaksanaan kebijakan umum. Dalam sistem ini partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama dan setia terhadap kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peran ini sewaktu-waktu dapat berpindah tangan. Dalam persaingan memenangkan pemilihan umum kedua partai berusaha untuk merebut dukungan orang-orang yang ada di tengah kedua partai yang sering dinamakan pemilih mengambang.

Inggris biasanya digambarkan sebagai contoh yang paling ideal dalam menjalankan sistem dwi partai. Partai buruh dan partai Konservatif boleh dikatakan tidak mempunyai pandangan yang banyak berbeda mengenai asas dan tujuan politik, dan perubahan pimpinan kemungkinan pada umumnya tidak terlalu mengganggu kontinuitas kebijakan pemerintah. Perbedaan yang pokok antara kedua partai hanya terdapat pada cara serta kecepatan melaksanakan berbagai program pembaharuan yang menyangkut masalah sosial, perdagangan, dan industri. Partai buruh lebih condong agar pemerintah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terutama di bidang ekonomi, sedangkan partai konservatif cenderung memilih cara-cara pembebasan berusaha.

Pada umumnya dianggap bahwa sistem dwi partai lebih kondusif untuk terpeliharanya stabilitas karena ada perbedaan yang jelas antara partai pemerintah dan partai oposisi. Di Indonesia pada tahun 1968 ada usaha untuk mengganti sistem multi partai yang telah berjalan lama dengan sistem dwi partai, agar sistem ini dapat membatasi pengaruh partai-partai yang telah lama mendominasi kehidupan politik. Beberapa akses dirasakan menghalangi badan eksekutif untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

3. Sistem Multi Partai

Umumnya dianggap bahwa keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat mendorong pilihan kearah sistem multi partai. Perbedaan tajam antara ras, agama atau suku bangsa mendorong golongan-golongan masyarakat lebih cenderung menyalurkan ikatan-ikatan terbatasnya (primordial) dalam satu wadah yang sempit saja. Dianggap bahwa pola multi partai lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik daripada pola dwi partai. Sistem multi partai ditemukan antara lain di Indonesia, Malaysia, Belanda, Australia, Perancis, Swedia, dan Federasi Rusia. Perancis mempunyai jumlah partai yang berkisar 17 dan 28 Partai, sedangkan di Federasi Rusia sesudah jatuhnya Partai Komunis jumlah partai mencapai 43 (Miriam Budiharjo, 2009:418).

Sistem multi partai, apalagi jika dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer, mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif, sehingga peran badan eksekutif sering lemah dan kurang mempunyai legitimasi dalam mengambil keputusan. Hal ini lebih disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Dalam keadaan semacam ini partai yang

berkoalisi harus selalu mengadakan musyawarah dan kerjasama dengan mitra koalisinya dalam kepentingan pemerintahan maupun kebijakan.

Dilain pihak, partai-partai oposisi pun kurang memainkan peranan yang jelas karena sewaktu-waktu masing-masing partai dapat diajak untuk duduk dalam koalisi baru. Hal semacam ini menyebabkan seringkali terjadi siasat yang berubah-ubah menurut kegentingan situasi yang dihadapi partai masing-masing. Lagipula seringkali partai-partai oposisi kurang mampu menyusun suatu program alternatif bagi pemerintah. Dalam sistem semacam ini masalah tanggung jawab menjadi kurang jelas.

Indonesia mempunyai sejarah panjang dengan berbagai jenis sistem multi partai. Sistem ini telah melalui beberapa tahap dengan bobot kompetitif yang berbeda-beda. Mulai 1955 Indonesia berupaya untuk mendirikan suatu sistem multi partai yang mengambil unsur-unsur positif dari pengalaman masa lalu, sambil menghindari unsur negatifnya.

Di Indonesia partai Golkar mulai mewarnai pemilu dengan sistem multi partai ini pada pemilu pertama sejak era Orde Lama tumbang yakni pada 1971. Disinilah peran partai Golkar mulai terlihat dalam pergulatan politik di Indonesia dimana partai Golkar sejak pemilu 1971 hingga 1997 selalu mengalami kemenangan yang sangat gemilang sehingga partai Golkar dalam pemerintahan Orde Baru selalu menjadi pengambil kebijakan dalam pemerintahan.

Pembahasan

A. Pengaruh partai Golkar terhadap dinamika politik di Kabupaten Madiun tahun 1999-2004.

Sejak berdirinya partai Golkar pada tahun 1964 hingga tahun 1997, partai Golkar menjadi sebuah partai yang fenomenal. Dikatakan fenomenal karena dalam perjalanannya partai yang menjadi kendaraan politik mantan Presiden Soeharto ini menjadi partai penguasa karena dalam setiap pemilu selalu mengalami kemenangan yang gemilang dan mutlak. Selama hampir 32 tahun partai Golkar merasakan masa keemasan dalam perjalanan dan dinamika politik bangsa Indonesia.

Pemilu tahun 1997 partai Golkar mengalami kemenangan mutlak yang kembali mengantarkan Soeharto menjadi presiden Indonesia yang kelima kalinya sejak tumbanganya Orde Lama. Gejolak dan emosi rakyat Indonesia selama kurun hampir 32 tahun meluap karena praktek KKN, intimidasi dan tekanan represif yang dilakukan pemerintahan Orde Baru sudah kelewat batas. Amarah rakyat semakin deras dengan ditemukannya berbagai kecurangan dalam pemilu 1997. Bentuk kemarahan rakyat pun diekspresikkan dengan melakukan aksi turun kejalan atau demonstrasi bersama mahasiswa menuntut adanya reformasi dan Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Aksi rakyat dan mahasiswa pun membuahkan hasil dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan wakil Presiden BJ. Habiebie hingga terselenggaranya pemilu untuk membentuk kelengkapan negara sejak Presiden Soeharto tumbang.

Partai Golkar yang saat itu menjadi partai pendukung pemerintah tidak luput dari kemarahan rakyat dan mahasiswa, Partai Golkar dianggap ikut bertanggungjawab atas kondisi negara saat itu karena menjadi kendaraan politik pemerintah. Partai Golkar menjadi sasaran kemarahan rakyat Indonesia

termasuk di Madiun. Hingga terselenggaranya pemilu pertama pada era reformasi yakni pada tahun 1999 berbagai bentuk intimidasi dan tekanan diterima oleh para pengurus partai beserta keluarganya oleh berbagai pihak.

Pemilu tahun 1999 Indonesia menerapkan sistem multipartai. Sebelum era reformasi Indonesia menerapkan sistem dwi partai dalam penyelenggaraan pemilu yakni dua partai politik dan satu Golongan Karya atau Golkar. Pada saat pemilu dimasa Orde Baru partai Golkar bukan menyebut diri sebuah partai tetapi Golongan kekerjaan yang terhimpun dari berbagai organisasi karya dikesatuan institusi pemerintah.

Pada saat pemilu tahun 1999, dimana pada saat itu Golkar berubah menjadi partai mengikuti mengikuti pemilu. Kebebasan di era reformasi dalam berpolitik menyebabkan banyak pihak yang berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut dengan mendirikan partai politik. Pada pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik. Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan sistem multipartai dengan peserta pemilu terbanyak di dunia.

Kondisi yang tertekan oleh berbagai pihak, partai Golkar tetap menghadapi pemilu pada tahun 1999. Secara logika khususnya di Kabupaten Madiun pada pemilu 1999 partai Golkar sudah mengalami sebuah kehancuran dimana partai Golkar selalu menjadi sasaran intimidasi dan tekanan dari berbagai pihak sejak era reformasi bergulir. Banyak yang menganggap pada tahun 1999 adalah pemilu terakhir yang diikuti oleh partai Golkar. Tetapi diluar dugaan dan tidak seperti yang diperkirakan, partai Golkar pada pemilu tahun 1999 mengalami sebuah kejutan. Partai yang diprediksi hancur ternyata dalam pemilu masih bisa mewakili 6 kadernya menduduki gedung DPRD Kabupaten Madiun. Partai Golkar menduduki tiga besar dalam pemilu 1999 setelah PDIP dan PKB. Ditengah gempuran tekanan politik partai Golkar masih mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Situasi tersebut tidak disia-siakan oleh para kader Golkar untuk kembali membangun kepercayaan masyarakat dan merubah konstalasi politik, berbagai elemen partai termasuk didalamnya terdapat ormas sebagai pendukung jalannya roda partai difungsikan kembali untuk meraih simpati dan kepercayaan rakyat, penyegaran pengurus termasuk pembersihan dari unsur militer yang pernah menjadi sumber traumatik rakyat kepada Partai Golkar dan mencoba memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat di Kabupaten Madiun. Berbagai aspirasi masyarakat ditampung dan diperjuangkan oleh para kader partai terutama yang duduk dalam lembaga legislatif atau DPRD sehingga berbagai program pro rakyat dihasilkan partai Golkar.

Perjuangan partai Golkar membangun kepercayaan di Kabupaten Madiun selama 5 tahun sejak pemilu pertama tidak sia-sia dan membuahkan hasil yang mengembirakan.

B. Pengaruh partai Golkar terhadap dinamika politik di Kabupaten Madiun tahun 2004-2009

Apabila pada saat pemilu tahun 1999 partai Golkar berhasil mendapatkan 6 kursi, pada pemilu selanjutnya yang diadakan pada tahun 2004 partai Golkar mendapatkan 12 kursi dan mengantarkan salah satu kadernya yakni Tomo Budiharsojo menduduki kursi Ketua DPRD Kabupaten Madiun. Kepercayaan masyarakat Madiun terhadap partai Golkar kembali pulih. Dengan adanya 12 kader partai Golkar di DPRD Kabupaten Madiun, partai Golkar semakin leluasa

dalam menjalankan program dan kebijakan. Ya, pengaruh partai Golkar terhadap konstalasi politik di Kabupaten Madiun cukup kuat. Perolehan suara pada pemilu tahun 2004 mengubah paradigma dan pandangan berbagai pihak terhadap partai Golkar. Apabila pada awal reformasi partai Golkar menjadi bulan-bulanan berbagai pihak, 5 tahun kemudian partai Golkar kembali menjadi partai yang disegani dan diperhitungkan oleh banyak pihak terutama dari partai lain karena mampu merubah konstalasi politik di Kabupaten Madiun. Selain daripada itu salah satu kebijakan monumental anggota Legislatif dari partai Golkar adalah terbentuknya pansus untuk membahas perubahan Undang-undang desa pada tahun 2007 yang dipimpin oleh salah satu kader Golkar yakni Suharno SH yang duduk di komisi A, yang menetapkan bahwa sistem pemilihan kepala Dusun di Desa se Kabupaten Madiun menggunakan sistem tes atau ujian, hal ini merubah sistem yang lama yakni menggunakan sistem pemilihan. Perubahan ini dilakukan mengingat banyaknya dampak negatif dimasyarakat apabila sistem pemilihan kepala dusun masih dipertahankan.

Salah satu gebrakan politik yang dilakukan partai Golkar pada kurun waktu tahun 2004-2009 adalah keikutsertaanya dalam pemilihan bupati yang diadakan secara langsung. Partai Golkar saat itu mencoba menduduki kursi eksekutif agar bisa lebih berkontribusi terhadap masyarakat Madiun. Pasangan Tomo Budiharsojo sebagai calon Bupati dipasangkan dengan Bagus Rizki Dirmawan sebagai calon wakil Bupati diberangkatkan dalam pemilihan. Walaupun akhirnya kalah tetapi momen tersebut setidaknya menunjukkan bahwa eksistensi partai Golkar masih sangat layak untuk diperhitungkan dan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap dinamika kehidupan politik di Kabupaten Madiun.

Penutup

A. Simpulan

Partai Golkar pada tahun 1999-2009 mengalami perkembangan politik yang dinamis di Kabupaten Madiun. Partai Golkar hingga saat ini masih bertahan, tidak hanya diperhitungkan tetapi menjadi partai Politik yang disegani oleh kawan ataupun lawan. Partai Golkar yang semula menjadi sasaran hujatan dan intimidasi kini menjadi partai yang cukup dinamis dan disegani oleh banyak pihak. Dalam waktu sepuluh tahun Partai Golkar mampu membangun pengaruh di masyarakat Madiun, menjadi partai yang memiliki pengaruh dalam dinamika kehidupan Politik Kabupaten Madiun dari awal reformasi hingga tahun 2009.

B. Saran

Partai Golkar kedepannya lebih bisa memfungsikan diri sebagai kelembagaan politik yang senantiasa mengawal aspirasi rakyat, bukan sebagai alat kepentingan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga kesalahan dimasa lampau atau rasa trauma dimasyarakat tentang Partai Golkar dimasa Orde Baru tidak terulang dimasa depan. Adapun saran untuk berbagai pihak diluar institusi Golkar yakni sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat, hendaknya secara obyektif menilai suatu partai politik dan hilangkan tradisi memilih partai dengan kepentingan jangka pendek.

2. Untuk IKIP PGRI Madiun, tingkatkan pembendaharaan buku tentang politik di perpustakaan IKIP PGRI Madiun untuk memudahkan mahasiswa belajar ilmu politik
3. Untuk Fraksi Golkar di DPRD Kabupaten Madiun, Terus kawal dan perjuangkan aspirasi rakyat anda untuk keberlangsungan eksistensi partai Golkar dimasa depan.
4. Untuk Ketua DPD Partai Golkar, Buktikan bahwa partai Golkar adalah partai Modern dan partainya anak muda.

Daftar Pustaka

Ahmad M Suryanegara. 2010. *Api Sejarah 2*. Jakarta: PT Gramedia

Arbi Sanit. 1993. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Basrowi dkk. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

Cheppy Harichayono.1991. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Yogyakarta: TWY

Henry.J.D. 2009. *Filsafat Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Husaini Usman. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

HB. Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam penelitian*. Surakarta: UNS

Inu Kencana Syafi'i. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: PRC

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Lisa Harisson.2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group

Miriam Budiarto. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia

Mensesneg.1994. *Pemberontakan G30S/PKI*. Jakarta: Perpustakaan Negara

Peter Calvert.1995. *Proses Sukses Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya

www.wikipedia.com, *Sejarah Berdirinya Partai Golkar*. Di Akses Maret 2010

Dokumen

DPD Partai Golkar. *SK DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Tahun 2001*. No: KEP.049/DPD-I/PG/V/2001

DPD Partai Golkar. *SK DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Tahun 2004*. No: Musda.013/DPD-I/PG/X/2004

DPD Partai Golkar. *SK DPD Partai Golkar Kabupaten Madiun Tahun 2004*. No: KEP.018/DPD-II/PG/X/2004

DPD Partai Golkar. *SK DPD Partai Golkar Kabupaten Madiun Tahun 2002*. No: KEP-06/DPD-II/PG/X/2002

DPD Partai Golkar. *Hasil Pemilu Tahun 1999*.

DPD Partai Golkar. *Hasil Pemilu Tahun 2004*.

DPD Partai Golkar. *Hasil Pemilu Tahun 2009*.

DPD Partai Golkar. *Nama Anggota Legislatif Tahun 1999-2009*